



**RENCANA KERJA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KLUNGKUNG
TAHUN 2021**

(RENJA 2021)

**DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KLUNGKUNG**

KATA PENGANTAR

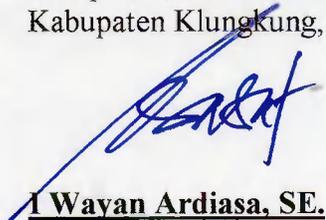
Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas bimbingannya, Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung tahun 2021 dapat kami selesaikan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan yang memuat rencana kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung di tahun 2021

Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung tahun 2021 merupakan rencana kinerja yang mengimplementasikan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung sesuai dengan tupoksi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung. Rencana Kerja menggambarkan target kinerja tahun 2021 sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan Renstra 2019-2023 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung Kabupaten Klungkung sejak awal bertekad untuk membenahi kinerja pemerintahan menuju *good governance*

Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam materi Rencana Kerja Tahunan (Rencana Kerja) ini, sehingga segala usul saran yang bermanfaat untuk meyempurnakannya sangat kami harapkan dari segala kalangan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu menyelesaikan penyusunan *Rancangan Akhir* Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung Tahun 2021 ini.

Klungkung, Maret 2020
Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
Kabupaten Klungkung,



Wayan Ardiasa, SE.
Pembina Utama Muda
Nip. 19651231 199203 1 169

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu.	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	8
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD..	10
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPDP	13
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	13
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	15
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	15
3.2 Prioritas Pembangunan, Tujuan, Sasaran dan Renja OPD	29
3.3 Program dan Kegiatan	31
BAB IV PENUTUP	39

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 49 TAHUN 2020 TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2021

RENCANA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan system penyelenggaraan pemerintahan yang terukur dan legitimate merupakan sebuah syarat terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Pengembangan tersebut baru akan terwujud jika seluruh OPD mampu menyusun perencanaan dan melaporkannya dengan baik dan terukur. Dalam penyusunan perencanaannya OPD diwajibkan menyusun rencana strategis lima tahunan yang selanjutnya dijabarkan kedalam rencana tahunan.

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023. Dokumen tersebut merupakan fokus pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan selama lima tahun yang akan datang. Pelaksanaan tugas tersebut ditujukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam renstra dan juga mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, Renstra dijabarkan ke dalam Rencana Kerja yang didalamnya memuat target kinerja yang hendak dicapai ditahun rencana. Penyusunan Rencana Kerja OPD, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana Kerja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang

memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung menyusun Rancangan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2021 Dalam Rencana Kerja tersebut diuraikan Program/Kegiatan, target Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan di tahun 2021 serta besar dana yang dibutuhkan dalam mencapai target tersebut.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung Tahun 2021, antara lain adalah sebagai berikut.

- 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4421);
- 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah,
- 5 Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 - 11 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 13 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 -2014 dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 -2019;
 - 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
 - 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 - 17 Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2005 – 2025,
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung;

- 19 Peraturan Bupati No. 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

1.3 Maksud Dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung Tahun 2021 dimaksudkan untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka perwujudan *good and clean governance*, disamping itu sebagai kerangka serta arah pembangunan untuk Tahun 2021. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini antara lain adalah

1. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2021,
2. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan,
3. Meyediakan pedoman dan penyusunan Rencana Kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung guna menciptakan perencanaan pembangunan yang terpadu untuk tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun sebelumnya dan Capaian Renstra OPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya (2019) perkiraan capaian tahun berjalan (tahun $n-1$), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Renja OPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundangundangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- 2.3 Isu-Isu Penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi, berisikan uraian mengenai Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, Tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4 Review Rancangan Awal RKPD sebagai perbandingan pelaksanaan Rencana Kerja yang sudah berjalan dengan Perencanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat berdasarkan usulan para pemangku kepentingan.
- 2.6 Pemetaan program kegiatan renstra dengan nomenklatur program kegiatan dan sub kegiatan Permendagri 90 Tahun 2019

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD
- 3.3 Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahanpertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung tahun sebelumnya (Tahun 2019) melaksanakan 2 (dua) bidang urusan yaitu urusan wajib bukan pelayanan dasar Bidang Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, urusan pilihan Bidang Urusan Perdagangan. Dua Bidang Urusan di Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan pada Tahun 2019 dilaksanakan dalam 5 Program dan 19 Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 17 707 050.105,47

Bidang Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Tahun 2019 dilaksanakan dalam 4 Program dan 15 Kegiatan dan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 3 055.203 027,00 Bidang Urusan Perdagangan pada Tahun 2019 dilaksanakan dalam 1 Program dan 4 Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 14.651 847 078.47 Di tahun 2019 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan merencanakan beberapa target sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 2018-2023 Sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting pencapaian di tahun rencana. Sementara itu untuk mengukur pelaksanaan kegiatan sebelumnya dikutip dari target Kinerja di tahun 2019, dimana dapat disimpulkan beberapa pokok-pokok materi antara lain

- 1 Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- 3 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
- 4 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD
- 5 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Pokok-pokok materi tersebut dijabarkan dari Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dan Pencapaian Renstra OPD Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2019 Kabupaten Klungkung dan Perkiraan Realisasi Kegiatan Tahun 2019, yang tercantum dalam tabel 2.1

Tabel 2.1

Rekap Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019
dan Perkiraan Capaian Renstra OPD Tahun 2020

PROGRAM DAN KEGIATAN	RENSTRA		TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2019						PERKIRAAN CAPAIAN TAHUN BERUJALAN (TAHUN 2020)			
	INDIKATOR/SATUAN	TARGET	ANGGARAN (Rp.)			FISIK			ANGGARAN (Rp.)			
		FISIK	ANGGARAN (Rp.)	RENCANA (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN IK	RENCANA	REALISASI	CAPAIAN IK	RENCANA	REALISASI	CAPAIAN IK
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN			17,707,050,105	16,493,570,444	93,15				14,939,929,072	14,939,929,072	100,00	
URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			3,055,203,027	2,639,571,552	86,40				3,173,495,600	3,173,495,600	100,00	
Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan	100	6.621.261.044	1,348,879,077	1,192,642,524	88,42	100,00	100,00	100,00	1,098,396,650	1,098,396,650	100,00
Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	4.182.038.344	939,468,572	817,626,934	87,03	100,00	100,00	100,00	892,422,410	892,422,410	100,00
Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Persentase Capaian Disiplin Aparatur	100	365.140.300	62,966,815	43,240,760	81,64	100,00	100,00	100,00	46,154,260	46,154,260	100,00
Pengelolaan Keaspiran	Persentase Surat yang Diarsipkan Sesuai Klasifikasi	100	113.260.300	23,791,260	21,791,260	91,59	100,00	100,00	100,00	11,387,260	11,387,260	100,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Tersedia Tepat Waktu	6	816.968.000	148,081,600	134,835,808	91,06	6,00	6,00	100,00	58,481,600	58,481,600	100,00
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya evaluasi dan pengendalian kinerja PD	100	466.438.600	90,214,720	90,199,764	99,97	100,00	100,00	100,00	55,225,720	55,225,720	100,00
Kegiatan Penstausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	12	577.414.900	94,365,400	84,957,008	90,04	12,00	12,00	100,00	74,625,400	74,625,400	100,00
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha kecil Menengah	Jumlah UMKM yang terb. administrasi dan berlegalisasi	125	2.852.421.250	465,035,450	392,226,506	84,34	1,01	0,90	89,11	496,733,950	496,733,950	100,00
Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi	Jumlah UMKM yang mengikuti promosi	400	1091718500	385,933,700	261,166,416	87,84	75,30	75,30	100,00	220,313,700	220,313,700	100,00
Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah tumbuhnya usaha baru	100	1117893750	77,478,750	61,266,850	79,08	1,80	1,80	100,00	167,603,750	167,603,750	100,00
Sosialisasi HAKI Kepada Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah pendaharan HAKI bagi UMKM	14	551809000	101,623,000	79,803,200	78,53	2,00	2,00	100,00	108,816,500	108,816,500	100,00
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi yang meningkat kualifikasinya menjadi sehat	55	3.451.662.100	600,454,000	582,024,653	96,93	5,00	5,00	100,00	774,836,500	774,836,500	100,00
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi	Persentase unit usaha koperasi yang mempunyai ijin	100	2.198.791.600	406,708,500	400,402,760	98,45	96,00	80,00	83,33	579,560,500	579,560,500	100,00
Pembinaan, Pengawasan, dan Perhargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah laporan kesehatan koperasi	148	828.630.000	144,150,000	136,886,193	94,96	100,00	61,00	61,00	133,181,000	133,181,000	100,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah koperasi baru terbentuk	181	426.260.500	49,598,500	44,735,700	90,20	30,00	27,00	90,00	62,095,000	62,095,000	100,00
Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi	Persentase peningkatan SHU Koperasi	22	2.141.243.900	640,834,500	472,677,879	73,76	17,00	17,00	100,00	803,468,500	803,468,500	100,00
Kegiatan Peningkatan Penyediaan Permodalan/Pembiayaan dan Sarana Prasarana bagi Koperasi	Persentase meningkatnya modal koperasi	10	556.225.500	90,505,500	65,430,750	72,29	6,00	6,00	100,00	84,576,500	84,576,500	100,00
Kegiatan Kamitran Koperasi di Bidang Produksi dan Aneka Usaha	Jumlah kerjasama/kamitran koperasi	32	722.890.500	81,499,500	68,722,116	84,32	21,00	21,00	100,00	90,001,500	90,001,500	100,00
Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi/KUD	Persentase koperasi yang mampu menilai kesehatannya sendiri	30	962.137.500	468,828,500	398,928,013	72,21	20,00	20,00	100,00	628,890,500	628,890,500	100,00
PERDAGANGAN			14,651,847,078	13,853,998,882	94,55				11,766,493,472	11,766,493,472	100,00	
Program Pembinaan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	Persentase bapokting tersedia cukup di Pasar Klungkung	100	69.221.212.153	14,651,847,078	13,853,998,882	94,55	100,00	100,00	100,00	11,766,493,472	11,766,493,472	100,00
Kegiatan Metrologi Legal dan Promosi Perdagangan	Persentase UTPP yang dilepas	25	4.082.701.728	1,706,511,900	1,657,895,883	97,15	25,00	25,00	100,00	563,915,128	563,915,128	100,00
Kegiatan Pembinaan Usaha Perdagangan	Jumlah laporan ketersediaan dan harga barang	52	293.898.700	48,399,700	43,130,400	95,89	52,00	52,00	100,00	51,360,500	51,360,500	100,00
Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan	Persentase sarana dan prasarana perdagangan yang direvitalisasi	100	22.987.894.497	6,624,724,114	5,842,118,939	88,59	65,00	65,00	100,00	4,001,410,628	4,001,410,628	100,00
Kegiatan Operasional Pengelolaan Pasar	Persentase tercapainya target di Pasar Umum yang dikelola oleh Pemkab	100	30.896.616.228	7,275,214,364	6,630,453,610	90,86	10,00	10,00	100,00	7,149,807,316	7,149,807,316	100,00

Dari hasil evaluasi terhadap tabel 2.1 diatas maka dapat disimpulkan beberapa pokok-pokok materi antara lain

A. Kinerja Keuangan (Serapan Anggaran)

Persentase capaian serapan anggaran secara keseluruhan program sudah cukup optimal yaitu sebesar 93,15%. Namun masih ada kegiatan yang belum optimal dalam capaian serapan anggaran yaitu Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi dengan realisasi sebesar 73,76%. Hal ini disebabkan karena realisasi jam pelajaran (JPL) dari yang direncanakan jauh berkurang yang diakibatkan oleh pelaksanaan pelatihan mundur dari yang direncanakan awal serta sisa anggaran Perjalanan dinas, dimana pelaksanaan kegiatan pembinaan ke Nusa Penida dan ke luar daerah Bali disinergikan.

B. Kinerja Fisik (output)

Untuk kinerja fisik (output) sudah optimal semua kegiatan dapat terlaksana dengan capaian rata-rata di atas 90%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dalam Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan terdapat capaian kinerja pelayanan yang harus di kaji berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2008 (tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 (tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota). Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Pada pembahasan Sub Bab ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan OPD Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung disesuaikan dengan target yang terdapat dalam Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 2013-2018 dan Rencana Kerja Tahunan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan.

**TARGET TAHUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN
KLUNGKUNG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target					Penjelasan
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan koperasi dan UMKM	Persentase meningkatnya skala usaha mikro menjadi usaha kecil	6,50%	6,80%	7,20%	7,50%	8,00%	Meningkatnya skala usaha dari usaha mikro menjadi usaha kecil
		Persentase koperasi sehat	23,58%	25,47	28,30%	30,19 %	32,08%	Meningkatnya koperasi sehat menunjukkan peningkatan manajerial pelaku usaha (Jumlah peningkatan koperasi sehat / jumlah seluruh koperasi tahun awal renstra)
2	Meningkatkan volume penjualan	Persentase peningkatan omzet penjualan	10%	10%	10%	10%	10%	Peningkatan omzet penjualan sektor UMKM paling tidak menunjukkan produktivitas UMKM (Peningkatan omzet penjualan/ Omzet penjualan tahun awal renstra)

Perkembangan Jumlah Koperasi di Kabupaten Klungkung Tahun 2014-2019

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Koperasi Aktif	108	111	115	115	106	115
Koperasi Tidak Aktif	21	21	21	21	26	26
Induk Koperasi	1	1	1	1	1	1
Koperasi Primer	128	131	135	135	131	140
Koperasi Unit Desa (KUD)	7	7	7	7	7	7
Non Koperasi Unit Desa / Non KUD	122	125	129	129	125	134

Data UMKM di Kabupaten Klungkung sampai dengan 2019

Jenis Usaha	Jumlah UMKM				
	2015	2016	2017	2018	2019
<i>1</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Usaha Mikro	29996	30036	30076	35503	35513
Usaha Kecil	222	222	222	222	222
Usaha Menengah	40	40	40	40	58
Jumlah	31367	31417	31467	31517	35793

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi OPD.

Beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut

- 1 Keterampilan pegawai perlu ditingkatkan terutama kemampuan memformulasikan dan mengimplementasikan program-program dalam konteks Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan.
2. Kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan di Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung masih perlu ditingkatkan.
- 3 Kapasitas lembaga Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung masih perlu ditingkatkan.
- 4 Adanya kesenjangan antara kemampuan anggaran pemerintah daerah dengan banyaknya rencana kegiatan.

Dalam Pengembangan pelayanan OPD perlu dilakukan analisa terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi baik melalui analisis Lingkungan Internal dan Analisis Lingkungan Eksternal, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD berdasarkan Analisa S.W O T memperlihatkan Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal, dapat diuraikan sebagai berikut

Analisis Lingkungan Internal

Berbagai langkah yang telah diupayakan selama ini, diantaranya telah mampu memberikan pondasi-pondasi sebagai kekuatan yang menjadi modal dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung di masa mendatang. Disisi lain, berbagai sisa permasalahan sebagai kelemahan masih melekat pada keberadaan dan fungsi kelembagaan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung yang perlu diantisipasi dalam mendukung keberhasilan atas apa yang akan dicapai dimasa mendatang. Berdasarkan hasil identifikasi, kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

a. Kekuatan (Strenght)

Modal atau landasan utama yang dapat dimanfaatkan atau dikembangkan di masa mendatang yang terdapat pada sisi kelembagaan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung sebagai suatu kekuatan meliputi.

1. Komitmen pimpinan dan jajaran aparat dalam mewujudkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung, sebagai bagian dari upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih,
2. Telah terjalinnya hubungan kerja dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan dalam penyelenggaraan perkoperasian, UMKM, perindustrian dan perdagangan.
3. Jumlah aparatur yang memadai.
4. Adanya Kelembagaan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

b. Kelemahan (Weakness)

Hambatan dan kendala yang terdapat pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung yang perlu di antisipasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada masa mendatang meliputi.

1. Kompetensi SDM relatif belum memadai. Dalam penyelenggaraan tugas dan kewenangan Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di wilayah Kabupaten Klungkung mendukung atau melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga selain jumlah yang memenuhi kebutuhan diperlukan juga kemampuan teknis atau kualitas sumber daya manusia yang memadai. Oleh karena itu selain melalui penambahan jumlah aparatur sebagaimana program Pemerintah, juga perlu dilakukan upaya peningkatan kemampuan dan profesionalisme melalui diklat-diklat dan beasiswa pendidikan formal.
2. Sarana dan prasarana kerja belum memadai. Dukungan fasilitas kerja berupa sarana dan prasarana sangat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, sehingga keterbatasan sarana prasarana kerja sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu perlu mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai.
3. Keterbatasan dukungan anggaran pembangunan di bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Pelayanan sektor Koperasi, UKM dan Perdagangan memerlukan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga untuk mewujudkan fungsi pelayanan dimaksud maka diperlukan dukungan anggaran pembangunan untuk penyediaan sarana dan prasarana dimaksud baik melalui APBD maupun APBN

4. Adanya perbedaan persepsi dan kepentingan dalam penyelenggaraan kewenangan di bidang Koperasi, UKM dan Perdagangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan hal yang harus diselesaikan bersama.

Analisis Lingkungan Eksternal

Berbagai kondisi eksternal yang berkembang turut memberikan pengaruh terhadap keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung. Kondisi eksternal tersebut dapat merupakan suatu peluang maupun ancaman yang dapat mendukung maupun menghambat keberhasilan yang ingin dicapai di masa mendatang. Peluang dan ancaman yang dihadapi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung meliputi

a. Peluang (Opportunity)

Peluang yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung di masa mendatang adalah sebagai berikut

- 1 Dukungan kebijakan maupun pendanaan kegiatan dari Pemerintah Pusat, sebagai faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung;
2. Posisi geostrategis Kabupaten Klungkung sebagai pusat perdagangan di Wilayah Bali Timur;
- 3 Adanya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima,
4. Klungkung menjadi pusat lalu-lintas perniagaan antar Kabupaten dan antar pulau sehingga prospek peluang investasi semakin tinggi dalam mengembangkan perkoperasian, UMKM dan perdagangan. Hal tersebut membuka peluang percepatan dalam melakukan pengembangan di kawasan Klungkung;
- 5 Semakin berkembangnya perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang berdampak kepada semakin mudahnya mengakses informasi dan komunikasi untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pembangunan,
6. Semakin bertumbuh kembangnya minat dan partisipasi masyarakat luas dalam penyelenggaraan pembangunan, termasuk di bidang perkoperasian, UMKM dan perdagangan.

b. Ancaman (Treat)

Ancaman yang dapat mengganggu dan menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

- 1 Kemampuan daya dukung prasarana jalan rendah, mengakibatkan percepatan distribusi rendah,
2. Kurangnya fasilitas pendukung ,
- 3 Seringnya terjadinya perubahan produk hukum nasional,
4. Persaingan yang makin ketat pada era globalisasi
- 5 Cepatnya perkembangan teknologi informasi, mengakibatkan perlunya penyesuaian dan antisipasi yang cepat dan tepat, baik dari sisi SDM dan dukungan sarana/prasarana,
6. Belum meratanya pelayanan jasa telekomunikasi di daerah pedesaan, mengakibatkan terhambatnya akses dan kelancaran komunikasi serta pertumbuhan perekonomian pedesaan,

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam membandingkan pelaksanaan Renja SKPD Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dengan Rancangan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2019 terdapat beberapa Program dan Kegiatan yang tidak sesuai dengan Perencanaan dalam RKPD, hal tersebut dikarenakan analisa kebutuhan anggaran yang kurang tepat, yaitu terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dalam Rancangan Awal RKPD atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda dan juga akibat adanya penyesuaian dengan perubahan nomenklatur Program dan Kegiatan menyesuaikan dengan Pemendagri 90 tahun 2019

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan melaksanakan Program dan Kegiatan tahunan, dalam Program dan Kegiatan tersebut salah satunya berdasarkan usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, dari LSM, Asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari usulan OPD Kabupaten, dan berdasarkan hasil pengumpulan informasi ,penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten,

2.6. Pemetaan program kegiatan renstra dengan nomenklatur program kegiatan dan sub kegiatan Permendagri 90 Tahun 2019

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) untuk tahun 2021 perlu dilakukan penyesuaian/mapping Program dan Kegiatan menyesuaikan dengan Permendagri 90 Tahun 2019 Adapun proses mapping program dan kegiatan dilaksanakan saat Forum Organisasi Perangkat Daerah. Untuk Dinas Koperasi hasil mapping dituangkan dalam Berita Acara Nomor 055/488/Diskop/2020 Hasil Pemetaan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan RPJMD/Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 seperti dalam lampiran.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu yang menyangkut arah dan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kebijakan Nasional yang terdapat dalam Renstra Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Perdagangan dapat diuraikan sebagai berikut

Renstra Kementerian Koperasi dan UKM

Visi dan Misi Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2015-2019 diarahkan untuk mendukung pencapaian **Visi Presiden** terpilih periode 2014-2019, sebagaimana tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebagai berikut:

"TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG"

Visi tersebut diwujudkan melalui tujuh **Misi Pembangunan** yaitu.

- 1 Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
- 3 Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
- 5 Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
- 7 Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Pelaksanaan ketujuh misi pembangunan nasional tersebut memperhatikan **Strategi Pembangunan Nasional** yang menggariskan hal-hal sebagai berikut:

- 1 **Norma Pembangunan** dalam periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:
 - a. Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
 - b. Setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan

pembangunan. Perhatian khusus kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

- c. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.

2. Tiga Dimensi Pembangunan.

a. Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat.

Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi. Manusia Indonesia unggul tersebut diharapkan juga mempunyai mental dan karakter yang tangguh dengan perilaku yang positif dan konstruktif. Karena itu pembangunan mental dan karakter menjadi salah satu prioritas utama pembangunan, tidak hanya di birokrasi tetapi juga pada seluruh komponen masyarakat, sehingga akan dihasilkan pengusaha yang kreatif, inovatif, punya etos bisnis dan mau mengambil risiko; pekerja yang berdedikasi, disiplin, kerja keras, taat aturan dan paham terhadap karakter usaha tempatnya bekerja, serta masyarakat yang tertib dan terbuka sebagai modal sosial yang positif bagi pembangunan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi sesama.

b. Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas.

- Kedaulatan pangan. Indonesia mempunyai modal yang cukup untuk memenuhi kedaulatan pangan bagi seluruh rakyat, sehingga tidak boleh tergantung secara berlebihan kepada negara lain.
- Kedaulatan energi dan ketenagalistrikan. Dilakukan dengan memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya energi (gas, batu- bara, dan tenaga air) dalam negeri.
- Kemaritiman dan kelautan. Kekayaan laut dan maritim Indonesia harus dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.
- Pariwisata dan industri. Potensi keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang unik merupakan modal untuk pengembangan pariwisata nasional. Sedangkan industri diprioritaskan agar tercipta ekonomi yang berbasis penciptaan nilai tambah dengan muatan iptek, keterampilan, keahlian, dan SDM yang unggul.

c. Dimensi pemerataan dan kewilayahan.

Pembangunan bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakat di seluruh wilayah. Karena itu pembangunan harus dapat menghilangkan/memperkecil kesenjangan yang ada, baik kesenjangan antar kelompok pendapatan, maupun kesenjangan antarwilayah, dengan prioritas.

- Wilayah desa, untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, karena penduduk miskin sebagian besar tinggal di desa,
- Wilayah pinggiran,
- Luar Jawa,
- Kawasan Timur

3 Kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil diperlukan sebagai prasyarat pembangunan yang berkualitas. Kondisi perlu tersebut antara lain.

- a. Kepastian dan penegakan hukum,
- b. Keamanan dan ketertiban,
- c. Politik dan demokrasi, dan
- d. Tetakelola dan reformasi birokrasi.

4. *Quickwins* (hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya).

Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Karena itu dibutuhkan output cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.

Presiden juga menetapkan **sembilan agenda prioritas (Nawa Cita)** yang perlu dilaksanakan dalam rangka membangun jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, sebagai berikut.

- 1 Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
- 3 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- 4 Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- 5 Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
- 7 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- 8 Melakukan revolusi karakter bangsa.
- 9 Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dari sembilan agenda prioritas Presiden tersebut di atas, **tiga Nawa Cita menjadi prioritas Kementerian Koperasi dan UKM** dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam periode 2015-2019, yaitu.

Agenda ke-2: Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya yang mencakup upaya-upaya yang diarahkan antara lain untuk:

- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan instansi Pemerintah Pusat, membuat laporan kinerja, dan membuka akses informasi publik.
- Menjalankan agenda reformasi publik dengan restrukturisasi kelembagaan, perbaikan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kompetensi aparatur, memperkuat monitoring dan supervise atas kinerja pelayanan publik.
- Membuka ruang partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan publik.

Agenda ke-6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya yang mencakup upaya-upaya yang diarahkan antara lain untuk:

- Membangun pasar tradisional sebanyak 5 000 pasar tradisional di seluruh Indonesia dan memodernisasikan pasar tradisional yang telah ada.
- Membangun sejumlah *Science* dan *Techno Park* di daerah-daerah.
- Meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan potensi yang belum tergarap dengan baik tetapi memberi peluang besar untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, yakni, industri manufaktur, industri pangan, sektor maritim, dan pariwisata.

Agenda ke-7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik yang mencakup upaya-upaya yang diarahkan antara lain untuk:

- Mewujudkan kedaulatan pangan melalui pendirian Bank Petani dan UMKM

Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM

Pencapaian visi Presiden dalam periode 2015-2019 oleh Kementerian Koperasi dan UKM akan difokuskan untuk mendukung pelaksanaan Misi Pembangunan Nasional yaitu mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Misi tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma pembangunan yang difokuskan pada (i) perbaikan kualitas hidup masyarakat; (ii) pengurangan ketimpangan, dan (iii) peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pelaksanaan misi dan norma-norma pembangunan tersebut diharapkan dapat membangun dan memperkuat Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan yang mencakup dimensi pembangunan yang inklusif dan dapat memperkecil kesenjangan antarkelompok pendapatan dan kesenjangan antar-wilayah.

Berdasarkan Visi dan Misi Presiden, Norma dan Dimensi Pembangunan, serta Nawa Cita, maka disusun Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM yaitu.

“Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha, kemandirian koperasi dan keterpaduan”

Tujuan tersebut menjadi landasan bagi penetapan Sasaran-sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2015-2019. Pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui upaya-upaya antara lain.

1. Peningkatan kompetensi UMKM dalam kewirausahaan dan inovasi, teknik produksi dan pengelolaan usaha, serta pemasaran di dalam dan luar negeri,
2. Peningkatan kemandirian koperasi melalui penguatan jati dirinya,
3. Peningkatan jangkauan, skema dan kualitas layanan sistem pendukung koperasi dan UMKM terkait diklat, pembiayaan, pendampingan usaha, layanan teknologi dan informasi, intermediasi pasar, dan kemitraan,
4. Penguatan koperasi dalam pemanfaatan sumber daya lokal di berbagai sektor perekonomian dan lapisan sosial dan ekonomi masyarakat;
5. Penguatan kaderisasi koperasi terutama di kalangan generasi muda dan kelompok produktif lainnya,
6. Peningkatan iklim usaha yang kondusif melalui penetapan dan perbaikan peraturan dan kebijakan, kemudahan perizinan, serta peningkatan kesempatan, kepastian dan perlindungan usaha, dan
7. Peningkatan keterpaduan kebijakan lintas instansi dan pusat-daerah yang didukung peran dan partisipasi pemangku kepentingan lainnya.

Renstra Kementerian Perdagangan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi pemerintahan yang diembatani melalui misi Kementerian Perdagangan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam membangun sektor perdagangan yaitu.

- 1 Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa,
2. Peningkatan pengamanan perdagangan,
- 3 Peningkatan akses dan pangsa pasar internasional,
4. Pemantapan promosi ekspor dan nation branding;
- 5 Peningkatan efektivitas pengelolaan impor barang dan jasa,
6. Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri,
- 7 Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri(PDN);
8. Optimalisasi /penguatan pasar berjangka komoditi, SRG dan pasar lelang;
- 9 Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- 10 Peningkatan perlindungan konsumen,
- 11 Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha,
12. Peningkatan kualitas kinerja organisasi,
- 13 Peningkatan dukungan kinerja perdagangan,
- 14 Peningkatan kebijakan perdagangan yang harmonis dan berbasis kajian,

Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja Kementerian Perdagangan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai pada masing-masing tujuan yang telah dipaparkan di atas, secara umum dapat dilihat sebagai berikut:

1. Peningkatan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa.

Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa adalah meningkatnya pertumbuhan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa. Indikator kinerja meningkatnya pertumbuhan ekspor barang nonmigas yang bernilai tam bah dan jasa yang digunakan adalah sebagi berikut:

- a. Pertumbuhan ekspor nonmigas,
- b. Kontribusi produk manufaktur terhadap total ekspor; dan
- c. Pertumbuhan ekspor jasa.

2. Peningkatan Pengamanan Perdagangan.

Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan perdagangan adalah meningkatnya pengamanan perdagangan dan kebijakan nasional untuk mendukung daya saing produk Indonesia baik di pasar domestik maupun internasional. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja meningkatnya pengamanan perdagangan dan kebijakan nasional adalah sebagai berikut:

- a. Persentase penanganan kasus dalam rangka pengamanan ekspor;
- b. Persentase pengamanan kebijakan nasional di dunia internasional, dan
- c. Presentase pemahaman terhadap hasil kerja sama perdagangan internasional.

3. Peningkatan Akses dan Pangsa Pasar Internasional

Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan akses dan pangsa pasar internasional adalah.

1 Meningkatkan diversifikasi pasar dan produk ekspor;

Indikator yang digunakan untuk mengukur meningkatnya diversifikasi pasar dan produk ekspor adalah.

- a. Pertumbuhan ekspor non migas produk (komoditi) utama,
- b. Pertumbuhan ekspor non migas produk (komoditi) prospektif;
- c. Pertumbuhan ekspor non migas ke pasar utama,
- d. Pertumbuhan ekspor non migas ke pasar prospektif;

2. Menurunnya hambatan akses pasar (tarif dan non tarif).

Indikator yang digunakan untuk mengukur menurunnya hambatan akses pasar (tarif dan non tarif) adalah.

- a. Penurunan index Non - Tariff Measures (*baseline* tahun 2013 berdasarkan data WTO)
- b. Penurunan rata-rata terbobot tarif di negara mitra (perbedaan dari *baseline* 2013);
- c. Pertumbuhan nilai ekspor yang menggunakan Surat Keterangan Asal Preferensi

4. Pemantapan Promosi Ekspor dan Nation Branding

Sasaran yang ingin dicapai dalam melakukan pemantapan promosi ekspor dan *nation branding* adalah.

1 Meningkatkan promosi citra produk ekspor (*nation branding*),

Bagaimana sebuah negara dipersepsikan oleh negara-negara lain, dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap bisnis, perdagangan, turisme, bahkan juga terhadap hubungan diplomasi, budaya, dan hubungan antarnegara lainnya. Oleh karena itu, upaya perbaikan citra Indonesia menjadi agenda yang penting bagi Kementerian Perdagangan. Citra suatu negara di dunia internasional biasanya diukur melalui

peringkat suatu negara menurut Nation Branding Index (NBI) yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga survei independen asing. Oleh karena itu Kementerian Perdagangan menggunakan indikator peringkat dan skor pencitraan produk ekspor Indonesia pada 'Simon Anholt *Nation Brand Index*(NBI) untuk mengukur kinerja meningkatnya promosi dan citra produk ekspor (*nation branding*). Indeks tersebut merupakan hasil penggabungan dari sejumlah dimensi yang dianggap berpengaruh terhadap *branding* suatu negara, yakni pariwisata, ekspor, pemerintahan, investasi dan imigrasi, kebudayaan, dan masyarakat. Namun demikian, Kementerian Perdagangan hanya memfokuskan kegiatan *nation branding* pada dimensi ekspor. Pada tahun 2013, skor dimensi ekspor NBI Indonesia mencapai angka 45,60 atau berada di peringkat 40 dari 50 negara yang disurvei. Target peningkatan citra produk ekspor Indonesia menurut *Nation Branding Index* khususnya dimensi ekspor adalah skor pada kisaran 45-46 pada tahun 2015 dan terus meningkat sampai mencapai skor kisaran 49-50 pada tahun 2019.

2. Optimalnya kinerja kelembagaan ekspor

Dalam mendukung peningkatan kinerja promosi diperlukan kelembagaan ekspor yang berkualitas. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja optimalnya kelembagaan ekspor adalah.

- a. Peningkatan pemanfaatan laporan pasar ekspor (*market intelligent* dan *market brief*) oleh dunia usaha,
- b. Pendirian Lembaga/Kantor Perwakilan/Pusat Promosi di dalam dan luar negeri (unit); dan
- c. Persentase PMKM peserta pelatihan ekspor yang menjadi eksportir baru.

Dalam mendukung peningkatan ekspor, para perwakilan perdagangan di luar negeri melakukan *market intelligent* untuk menyusun laporan *market intelligent* dan *market brief* yang akan dimanfaatkan para pelaku usaha dalam negeri untuk memasuki pasar dan meningkatkan ekspor di negara terkait. Kementerian Perdagangan menargetkan peningkatan pemanfaatan laporan pasar ekspor oleh dunia usaha pada tahun 2015 sebanyak 500 pelaku usaha dan diakhir periode pada tahun 2019 peningkatan mencapai 1100 pelaku usaha. Dalam meningkatkan promosi di luar negeri Kementerian Perdagangan telah memiliki 19 kantor promosi yang dinamakan Indonesia Trade Promotion Center (ITPC). Pembentukan badan promosi dagang di luar negeri juga diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014, tentang Perdagangan pasal 80. Guna mengoptimalkan kinerja kelembagaan ekspor dalam periode 2015 sampai dengan 2019 Kementerian Perdagangan berencana untuk mendirikan lembaga/kantor perwakilan

pusat promosi di dalam dan luar negeri sebanyak 8 lembaga/kantor/pusat promosi. Setiap tahunnya Kementerian Perdagangan menyelenggarakan pelatihan bagi para pelaku usaha yang belum dapat mengeksport produknya. Dengan pelatihan ini diharapkan para pelaku usaha lokal dapat menjadi eksportir, sehingga dapat meningkatkan jumlah ekspor Indonesia. Kementerian Perdagangan menargetkan persentase PMKM (pedagang mikro kecil dan menengah) peserta pelatihan ekspor yang menjadi eksportir baru meningkat sebesar 10 persen pada tahun 2015 dan pada tahun 2019 meningkat sebesar 15 persen dari tahun sebelumnya.

5. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Impor Barang dan Jasa

Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan efektivitas pengelolaan impor barang dan jasa adalah meningkatnya efektivitas pengelolaan impor. Pengelolaan Impor dalam rangka mencapai surplus neraca perdagangan memerlukan instrumen berupa kebijakan yang bertujuan menstabilkan ataupun menjaga neraca perdagangan serta dalam rangka menciptakan iklim perdagangan luar negeri dan dalam negeri yang kondusif. Meningkatnya efektivitas pengelolaan impor dimaksud adalah utamanya dalam mengelola impor untuk baik dalam rangka peningkatan ekspor ataupun penguatan pasar dalam negeri. Indikator yang digunakan untuk mengukur meningkatnya efektivitas pengelolaan ekspor adalah Penurunan pangsa impor barang konsumsi terhadap total impor. Dengan meningkatkan efektivitas pengelolaan impor diharapkan pangsa impor barang konsumsi terhadap total impor akan semakin menurun. Kementerian Perdagangan menargetkan penurunan pangsa impor barang konsumsi terhadap total impor pada tahun 2015 adalah sebesar 7 persen dan tahun 2019 sebesar 6,0 persen.

6. Pengintegrasian dan Perluasan Pasar Dalam Negeri

Sasaran yang ingin dicapai dalam menguatkan pasar dalam negeri adalah.

1. Meningkatnya pertumbuhan PDB sektor perdagangan,

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja meningkatnya pertumbuhan PDB sektor perdagangan adalah pertumbuhan PDB sub kategori Perdagangan Besar dan Eceran, bukan mobil dan sepeda motor. Pertumbuhan PDB sektor perdagangan tidak terlepas dari kondisi perekonomian nasional yang sangat dipengaruhi oleh berbagai hal, di antaranya adalah konsumsi masyarakat dan konsumsi pemerintah. Oleh karena itu, meningkatnya daya beli masyarakat dan pengeluaran pemerintah dapat mendorong laju pertumbuhan konsumsi nasional sehingga memacu pertumbuhan perekonomian nasional. Sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019, pertumbuhan

perekonomian nasional yang diukur melalui pertumbuhan PDB pada tahun 2015 diperkirakan mencapai 5,8 persen. Ekspektasi pertumbuhan tersebut ditunjang dengan pengeluaran konsumsi masyarakat yang mencapai 5,4 persen dan pengeluaran pemerintah sebesar 4,0 persen. Selanjutnya, pertumbuhan PDB nasional diproyeksikan akan mengalami peningkatan menjadi sebesar 8 persen pada tahun 2019 Hal ini ditopang dengan pertumbuhan konsumsi masyarakat sebesar 5,9 persen dan pengeluaran pemerintah sebesar 6,2 persen pada tahun 2019. Mempertimbangkan beberapa hal di atas, seperti yang tercantum di dalam RPJMN 2015-2019 target pertumbuhan PDB sub kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobildan Sepeda Motor pada tahun 2015 adalah sebesar 5,0 persen. Selanjutnya pada tahun 2019 pertumbuhan POB ril sub sektor Perdagangan Besar dan Eceran diproyeksikan akan mengalami peningkatan menjadi sebesar 8,2 persen.

2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana distribusi dan logistik nasional.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja meningkatnya konektivitas distribusi dan logistik nasional adalah.

- a. Jumlah Pasar Rakyat Tipe A,
- b. Jumlah Pasar Rakyat Tipe B,
- c. Jumlah Pusat Distribusi Regional (PDR);
- d. Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat Tipe A yang telah direvitalisasi.

Target pembangunan pasar rakyat sesuai yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 adalah sebanyak 5000 pasar Target pembangunan tersebut merupakan tugas bersama dari beberapa Kementerian/Lembaga, salah satunya adalah Kementerian Perdagangan. Sebagai salah satu upaya untuk mencapai target dimaksud, selama periode 2015-2019 Kementerian Perdagangan memproyeksikan pembangunan pasar rakyat Tipe A sebanyak 67 - 100 pasar per tahun dan pembangunan pasar rakyat Tipe B sebanyak 70- 120 pasar per tahun. Adapun jumlah Pusat Distribusi Regional yang dibangun adalah sebanyak 2 Pusat Distribusi Regional per tahun. Sementara itu, Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat Tipe A yang telah direvitalisasi ditargetkan mengalami peningkatan 10-20 persen sepanjang periode 2015-2019

Prioritas Pembangunan Provinsi Bali

Isu-isu strategis yang menjadi tantangan dalam perencanaan pembangunan Bali yang menjadi landasan penentuan prioritas pembangunan Propinsi Bali yaitu.

1. Kualitas perencanaan pembangunan daerah masih belum optimal
2. Sinergisitas perencanaan pembangunan daerah belum optimal
3. Pengendalian dan evaluasi program belum optimal

Berdasarkan isu strategis tersebut Provinsi Bali mengangkat tema “Memperkuat Sinergi dalam Pertumbuhan Berkualitas, Merata dan Berdaya Saing Menuju Pembangunan Berkelanjutan” Dengan prioritas pembangunan daerah Propinsi Bali Tahun 2019, yaitu.

1. Pembangunan manusia melalui Peningkatan Pelayanan Dasar
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui pengembangan infrastruktur dan pelestarian lingkungan.
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, pariwisata, industri kreatif dan jasa produktif.
4. Menjaga ketentraman dan ketertiban serta pelestarian budaya.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang berkualitas.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Klungkung

Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 mengangkat tema “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang Dilandasi dengan Pembangunan SDM yang Handal” Untuk mewujudkan tema tersebut dijabarkan melalui prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan ini selain didasarkan pada persoalan eksisting di Kabupaten Klungkung, juga dirancang untuk mendukung prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Bali. Adapun permasalahan dan Isu strategis yang melandasi penyusunan prioritas daerah di Kabupaten Klungkung dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Permasalahan, Isu strategis dan Prioritas Daerah Tahun 2021

No.	Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Daerah
1	Masih rendahnya kualitas Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini sehingga masyarakat cenderung langsung masuk ke SD. dari 3000 siswa SD kelas 1, 25% nya tidak mengenyam pendidikan PAUD	Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 5-6 tahun masih rendah. Data tahun 2019, APS usia 5-6 th hanya sebesar 65,31%	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia
	Masih rendahnya kualitas Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah lembaga PAUD aktif sekitar 135 lembaga, yang sudah terakreditasi A sebanyak 17 lembaga, terakreditasi B sebanyak 77 lembaga, 3 lembaga terakreditasi C dan sisanya belum terakreditasi	
	Beberapa sekolah masih kurang prasarana pendidikan. Sarana pendidikan yang masih perlu ditingkatkan	Persentase SD yang terakreditasi A tahun 2019 sebesar 44,85%, atau 61 SD dari 136 SD yang ada di Kabupaten Klungkung	
		Persentase SMP yang terakreditasi A tahun 2019 hanya sebesar 56,25%, atau sebanyak 13 SMP dari keseluruhan SMP yang berjumlah 23.	

	Penerapan kurikulum nasional yang belum merata di tingkat sekolah serta belum tersedianya kurikulum muatan lokal yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten	Sesuai UU 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah wajib menetapkan kurikulum muatan lokal sesuai kondisi daerah, sampai saat ini belum tersedia.
		Masih terdapat guru yang belum memperoleh pelatihan kurikulum nasional di tingkat satuan pendidikan
	Tingginya angka penyalahgunaan kendaraan bermotor khususnya sepeda motor di kalangan siswa yang belum cukup umur	Pembinaan karakter siswa yang masih perlu ditingkatkan agar memiliki integritas, semangat gotong royong, kemandirian, jiwa yang nasionalis serta religius yang berkembang secara dinamis dan membentuk keutuhan pribadi.
	Masih belum meratanya kesempatan belajar yang sesuai dengan jenjang umur usia sekolah	Angka Partisipasi Murni (APM) SD tahun 2019 sebesar 93,02%, sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) yang melebihi 100% ini menunjukkan bahwa masyarakat cenderung menyekolahkan anaknya sejak usia dini.
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP tahun 2019 sebesar 88,13%, sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) yang mencapai 105.51%.
No.	Permasalahan	Isu Strategis
	Masih adanya siswa yang putus sekolah	Jumlah siswa putus sekolah SD tahun 2019 ada 2 siswa Jumlah siswa putus sekolah SMP tahun 2019 ada 6 siswa
	Masih rendahnya mutu guru yang dikaitkan dengan hasil ujian kompetensi guru yang telah dilaksanakan secara nasional	Jumlah guru yang telah bersertifikat pendidik sebanyak 1415 orang dari 2207 guru PNS maupun Non PNS di Kabupaten Klungkung
	Masih belum meratanya penyebaran guru	Penempatan guru honorer yang masih belum sesuai dengan kompetensinya
	Masih rendahnya mutu SPNF SKB Klungkung	SPNF SKB yang pada tahun 2019 baru menjadi satuan pendidikan perlu ditingkatkan kualitasnya dari segi sarpras serta pemenuhan Pamong Belajar
	PKBM yang belum dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Klungkung	PKBM yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak mampu meningkatkan mutu lembaganya karena kurang pendanaan, dari 5 PKBM yang pernah ada
	Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang tidak memenuhi kriteria baik dari segi sarpras dan tenaga pengajarnya	Terdapat 9 LKP yang terdaftar di Kabupaten Klungkung dan semuanya belum memenuhi kriteria minimal
	Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah	Angka rata-rata lama sekolah yang tergolong rendah, sampai dengan tahun 2019 tercatat 7,75 tahun. Angka Melek Huruf tergolong rendah, sampai dengan tahun 2019 tercatat 87,81% penduduk usia 25 tahun keatas yang mampu membaca dan menulis Dari 106.035 jiwa penduduk usia 15 tahun keatas, yang memiliki ijazah minimal setara SMA sebanyak 42.604 jiwa atau sekitar 40,18%.
	peningkatan kualitas kesehatan ibu, bayi, balita dan lansia	kecenderungan peningkatan AKI (th 2017 : 70,95 & th 2018 : 140,8) kecenderungan peningkatan AKB (th 2017 : 6,74 & th 2018 : 8,4) kecenderungan peningkatan AKABA (th 2017 : 8,51 th 2018 : 9,9) prevalensi stunting th 2018 : 16,3
	pengendalian penyakit menular & penyakit tidak menular	masih adanya infeksi baru HIV (0,02) insiden penyakit TB 46,6/100.000 pddk prevalensi penderita hipertensi 20%
	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	pemenuhan sarana prasarana & alkes (ASPAK : < 80%)
	Belum lengkapnya sarana rumah sakit (Data kelengkapan sarana RS 2019 : 64,5%, sumber ASPAK 2019)	Pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan RS untuk meningkatkan kualitas pelayanan RS
	Belum lengkapnya alat kesehatan rumah sakit (Data kelengkapan alat kesehatan RS 2019 : 49,28%, sumber ASPAK 2019)	
		Prioritas Daerah

	Belum lengkapnya prasarana rumah sakit (Data kelengkapan prasarana RS 2019 : 65,71%, sumber ASPAK 2019)		
	Layanan Perpustakaan keliling belum bisa dilaksanakan secara optimal terutama untuk wilayah di Nusa Penida karena terbatasnya Sumber	Belum optimalnya layanan perpustakaan untuk wilayah Nusa Penida	
	Peralatan permainan edukatif (APE) dan meja baca belum memiliki tempat yang memadai sehingga belum dimanfaatkan secara optimal	Perlunya peningkatan jenis, jumlah koleksi perpustakaan dan sarana prasarana penunjang dalam upaya pengembangan perpustakaan	
	Peralatan pendukung TI (Teknologi Informasi) belum memadai dan belum terkoneksi dengan Internet (KOMINFO) untuk pengembangan layanan	Diperlukan regulasi yang mengatur pengembangan perpustakaan Desa/ Kelurahan dan perpustakaan Sekolah	
	Belum tersedianya ruang pengolahan koleksi buku perpustakaan	Perlu dilakukan upaya yang lebih efektif efisien dalam pembinaan, pengawasan dan pengembangan perpustakaan Desa, Kelurahan dan Sekolah	
No.	Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Daerah
2	Belum mantap dan meratanya pelayanan akses jalan antar desa menuju pusat pertumbuhan ekonomi dan menuju obyek-obyek pariwisata (jalan	Tuntutan Ketersediaan Infrastruktur yang memadai bagi masyarakat	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik
	Belum maksimalnya fungsi jaringan irigasi dan tingkat laju abrasi yang cukup tinggi berdampak terhadap existing tanggul pantai banyak yang rusak		
	Belum terlayannya semua masyarakat akan air bersih dan ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan menuju 100-0-100		
	Masih rendahnya kepedulian masyarakat tentang tata ruang		
	Belum tertatanya lingkungan perumahan dan kawasan permukiman serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan sarana prasarana	Tuntutan perumahan dan lingkungan yang layak huni	
	belum optimalnya pendataan aset tanah	pembuktian penguasaan tanah aset daerah yang belum jelas sehingga belum adanya bukti hak penguasaan	
	belum optimalnya pengelolaan sampah	perubahan iklim	
	pencemaran air udara dan tanah	pencemaran air udara dan tanah	
	pengolahan sampah belum maksimal	pengelolaan sampah	
3	Ketersediaan Pangan di Masyarakat Belum Beragam	Ketahanan Pangan yang Belum Optimal	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
	Menurunnya ASFR	Pemakaian Kontrasepsi MKJP masih rendah masih ada remaja yang menikah dibawah umur 20 tahun	
	Belum optimalnya kualitas kesehatan koperasi (Koperasi sehat, cukup sehat%)	Belum optimalnya SDM koperasi (Sertifikasi Pengurus dan pengawas)	
	Belum optimalnya pemingkatan kelembagaan koperasi (Kwalitas kelembagaan koperasi%)	Kurangnya kemitraan antar koperasi	
	belum optimalnya pemanfaatan teknologi pendukung usaha seperti pengemasan, pemasaran dan Tl. (usaha mikro menjadi kecil.... %)	belum optimalnya sdm pelaku usaha, manajemen usaha masih konvensional	
	Belum Beragamnya olahan produk perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan untuk mendukungkemantapan ketahanan pangan	
	Belum optimalnya produksi perikanan tangkap dan budidaya		
	Pelaksanaan promosi pariwisata belum optimal karena adanya pergeseran pelaksanaan promosi ke sistem digital	Belum meningkatnya minat kunjungan wisatawan pada saat promosi Pariwisata	
	Kurangnya pengembangan dan pemeliharaan di Destinasi wisata karena status lahan belum jelas dan belum tersusunnya perencanaan dan	Belum optimalnya pengembangan dan pemeliharaan destinasi wisata yang berkualitas	
	Kualitas Industri Pariwisata belum sesuai standar	Belum semua industri pariwisata sesuai standar	
	Kurangnya dukungan masyarakat untuk pengembangan Desa Wisata dan pembentukan Pokdarwis	Belum optimalnya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan Pariwisata	
	Produksi pertanian menurun	Tingginya alih fungsi lahan pertanian dan rendahnya profesionalisma petani	
	Pertanian Organik belum optimal		

	Kabupaten Klungkung belum memiliki Pasar ber-SNI	1 Periode ada 1 Pasar ber-SNI	
	Pelayanan tera / tera ulang belum optimal	Klungkung 1 Ukuran	
	Masih Sering terjadi gejolak harga Bapokting di tingkat konsumen	Pengendalian tingkat inflasi daerah	
	Sarana dan prasarana pasar belum memadai	Perlu adanya revitalisasi pasar	
No.	Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Daerah
4	Masih kurangnya sarana prasarana dan sumber daya manusia di Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kab. Klungkung	Masih tingginya angka gangguan Kamtibmas (Ketentraman Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat)	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif
	Masih lemahnya penegakan Perda dan Perkada		
	Kurang sadarnya masyarakat mendukung terciptanya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat		
	Masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap pencegahan bahaya kebakaran		
	Tingginya tingkat risiko bencana di Kab.Klungkung (163,39) (Sumber data : INARISK BNPB)	Indeks Risiko Bencana di Kab.Klungkung tergolong tinggi (163,39) (Sumber data : INARISK BNPB)	
	Masih rendahnya tingkat kapasitas masyarakat Klungkung dalam menghadapi bencana (0,48) (Sumber data : Buku Kajian Risiko Bencana 2018)		
	belum terwujudnya tertib administrasi kependudukan	Belum optimalnya pemenuhan sarpras pelayanan	
		Belum optimalnya partisipasi stakeholder	
		Belum optimalnya pemenuhan blangko/dokumen pusat	
	Penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat belum optimal	Meningkatkan perekonomian desa melalui BUMDes	
		Pemahaman Perangkat desa terhadap regulasi masih kurang	
	Cakupan layanan informasi berjalan lancar baru mencapai 90 % dari target 95 % disebabkan oleh pemasangan wifi BSI tahun 2019 baru terlaksana 89	Meningkatkan Layanan Media Informasi	
	Tingkat Keterbukaan Informasi publik tahun 2019 telah mencapai 90% sesuai dengan target. Realisasi ini Sesuai dengan daftar kepatuhan yang ditentukan	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	
	Indek Reformasi Birokrasi dapat nilai 18,52 dari target nilai 19 untuk tahun 2021 ditargetkan dengan nilai 21	Terlaksananya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	
	Persentase data statistik sektoral yang tersedia 70% sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dan tahun 2021 diharapkan supaya tidak lagi menurun.	Mengoptimalkan Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	
	Indek kematangan keamanan informasi baru mencapai Level II dengan kategori kurang. Di tahun 2021 ditargetkan di Level III. Adapun kategori per	Terseleenggaranya layanan keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE	
	Masih kurangnya pemahaman sumber daya manusia (SDM) tentang kearsipan	Belum terkelolanya arsip-arsip penting daerah	

	Belum tertata arsip dinamis sesuai standar		
	Belum terdata dan tertata arsip statis yang ada di Kabupaten Klungkung		
	Kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah belum optimal (Rata-rata capaian output kegiatan RKPD pada tahun 2018 sebesar 86,45%)	Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	
	Kualitas perencanaan perangkat daerah yang dikoordinasikan bidang PSDAIK belum optimal (Capaian rata-rata nilai komponen perencanaan)		
	Kualitas perencanaan perangkat daerah yang dikoordinasikan bidang PPM belum optimal (Capaian rata-rata nilai komponen perencanaan)		
	Belum optimalnya ketersediaan dokumen hasil kelitbang dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan daerah (Dari sebanyak 72 program)		
	Pendapatan dari PBB-P2 dan BPHTB belum optimal	Meningkatnya kebutuhan pembiayaan untuk memenuhi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	
	Pendapatan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya belum optimal		
No.	Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Daerah
	Pelayanan kesekretariatan pada BPKPD Kab. Klungkung belum optimal	Tuntutan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas dan tuntutan pengelolaan aset daerah yang berkualitas	
	Perlu adanya pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah		
	Belum sempurnanya tata kelola dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah		
	Laporan aset daerah belum optimal		
	Pengelolaan keuangan daerah terkait dengan pertanggungjawaban APBD belum optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan		
	Pembinaan PNS melalui waskat, idealnya dilaksanakan oleh atasan langsung pegawai bersangkutan dimasing-masing perangkat daerah	Administrasi kepegawaian belum maksimal	
	Dalam kenyataan ternyata waskat ini belum efektif untuk mencegah pelanggaran disiplin PNS	Kompetensi PNS belum optimal 3. Disiplin PNS belum memadai	
	mengurangi kelangkaan kader pimpinan	Administrasi kepegawaian belum maksimal	
	menghilangkan kasus promosi dipaksakan	Kompetensi PNS belum optimal	
	menjaga ketersediaan suksesor	Disiplin PNS belum memadai	
	Mempersiapkan pemimpin dengan baik		
	Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerah	Kualitas pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah belum optimal	
	Belum optimalnya tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan		
	Belum Optimalnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		
	Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas korupsi masih belum memadai		

Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung

Dalam mewujudkan ke-4 prioritas tersebut, ditetapkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan prioritas tersebut. Sasaran-sasaran ini juga akan dikaitkan dengan indikator-indikator kinerja agar dapat dinilai tingkat keberhasilannya. Arah kebijakan dan sasaran prioritas pembangunan tersebut dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Prioritas, Sasaran dan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021

No.	Prioritas Daerah	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Cara Pengukuran	Target 2021
1	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Lestari dan berkembangnya kebudayaan daerah	Terjaga dan berkembangnya kelestarian kebudayaan benda (tangible) dan tak benda (intangible)	Cakupan Budaya tak benda yang lestari	Jumlah budaya tak benda yang dilestarikan/jumlah data budaya tak benda yang hampir punah x 100%	58,41
				Cakupan Budaya benda yang lestari	Jumlah budaya benda yg ditata/jumlah data budaya yang didata x 100%	58,82
		Terwujudnya pembangunan	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Data BPS	71,37
		manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Data BPS	8
				Angka Harapan Lama Sekolah	Data BPS	13,8
			Meningkatnya daya saing masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	Data BPS	0,98
2	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong Peningkatan	Berkurangnya ketimpangan infrastruktur antar wilayah	Meningkatnya kualitas infrastruktur layanan dasar	Cakupan desa/kelurahan yang terpenuhi infrastruktur layanan dasar		67,8
						Target
	kualitas	Meningkatnya	Menurunnya beban	Indeks kualitas air	Hasil pengukuran	7
	pelayanan publik	kualitas lingkungan hidup	pencemaran air, tanah dan udara			
3	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan	Menurunnya angka kemiskinan dari 6,29% menjadi 3%	Meningkatnya kemandirian PMKS	Cakupan PMKS mandiri	Jumlah PMKS mandiri dibagi jumlah PMKS x 100%	53
			Meningkatnya Kesetaraan	Pengangguran	Data BPS	202
			Gender	Perempuan		
				Angka Rata Rata Lama Sekolah	Data BPS	7,72

	masyarakat					
			Terpenuhinya hak anak	Capaian Kabupaten	Jumlah kriteria	80
				Layak Anak tingkat	Kabupaten Layak	
				madya	Anak yang tercapai /	
			Terwujudnya masyarakat	Persentase Desa	Jumlah desa	32
			desa yang mandiri	berstatus	berstatus	
				swasembada	swasembada/jumlah	
					seluruh desa x 100%	
			Terwujudnya pertumbuhan	Tercapainya TFR	Data BPS	98
			penduduk yang berkualitas	(2,1), NRR (1), LPP		
			dan seimbang	(1,1)		
		Terwujudnya	Meningkatnya investasi	PMA (US\$)	Nilai realisasi	754.161
		pertumbuhan	daerah		investasi asing	
		ekonomi sebesar 6%			dalam dolar US	
		setiap tahun		PMDN (Milyar Rp)	Nilai realisasi	1.402,00
					investasi dalam	
					negeri dalam juta	
					rupiah	
			Meningkatnya peran usaha	Kontribusi	Jumlah PDRB Sektor	8,13
			ekonomi rakyat		Perdagangan besar dan	
				lapangan usaha	eceran, reparasi	
				perdagangan		
				terhadap PDRB (%)		
				Kontribusi	Jumlah PDRB Sektor	10
					industri	
				lapangan usaha		
				industri		
				pengolahan		
				terhadap PDRB (%)		
				Kontribusi	Jumlah PDRB Sektor	17
					penyediaan akomodasi	
				lapangan usaha		
				penyediaan		
				akomodasi dan		
				makan minum		
				terhadap PDRB (%)		
				Nilai kontribusi	Nilai kontribusi	1.259.158
				lapangan usaha	lapangan usaha	
				pertanian,	pertanian,	
				kehutanan dan	kehutanan dan	
				perikanan alam	perikanan alam	
				PDRB (juta Rp.)	PDRB (juta Rp.)	
			Meningkatnya Keragaman	Skor Pola Pangan	Hasil Penilaian	88,21
			Pola Konsumsi Pangan			
4	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang responsif, transparan, santun dan inovatif	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan transparansi pemerintah daerah	Tingkat akuntabilitas kinerja Pemkab	Hasil Penilaian AKIP	71
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kualitas pelayanan publik	Hasil penilaian	3,38
		Terciptanya ketentraman, ketertiban umum dan stabilitas politik yang mantap	Meningkatnya kesadaran demokrasi	Tingkat partisipasi pemilih (Pileg, Pilpres, Pilkada dan Pilkel)	jumlah pemilih yang	76,7
			Menurunkan potensi	Penurunan Potensi	Angka potensi	15

		konflik	Konflik sosial	konflik sosial	
		Menurunnya tingkat risiko	Indeks Risiko	Hasil Penilaian	163,94
			Bencana (%)		
		Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap	Jumlah pelanggaran perda	Jumlah pelanggaran Perda	330
		peraturan perundang-			Target

3.2 Prioritas Pembangunan, Tujuan, Sasaran dan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Dari tabel di atas (Tabel 3.2) Prioritas Pembangunan Daerah yang terkait dengan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung adalah pada ***prioritas butir ke-3*** yaitu “***Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat***”

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam butir ke-3 Prioritas Pembangunan Daerah ***Sasaran*** yang terkait dengan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung adalah “***Meningkatnya peran usaha ekonomi rakyat***”

Dari sasaran tersebut menjadi acuan dalam menetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klungkung. Adapun Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan target Kinerja di tahun 2021 yang disesuaikan dengan Permendagri 90 Tahun 2019 dapat dilihat seperti yang di tampilkan pada Tabel 3.3 berikut ini

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Tahun 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja
Tumbuh dan berkembangnya Koperasi, UMKM dan Perdagangan	Meningkatnya kualitas pengelolaan koperasi dan UMKM	Persentase koperasi sehat	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Terbentuknya Badan Usaha Koperasi Di Kabupaten Klungkung	100
			Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terbentuknya Kantor Cabang, Cabang pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Klungkung	100
			- Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Penyuluhan, Sosialisasi dan Verifikasi permohonan Ijin Koperasi	100
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Laporan Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi	1
			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi dalam Daerah	50
			- Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Perundang undangan	50
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah Koperasi Yang Meningkat Kualifikasinya Menjadi Sehat	3
			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kesehatan Koperasi	3
			- Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	50
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Mampu Menilai kesehatannya Sendiri	12
			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengurus, Pengawas dan Pengelola Bersertifikasi	2,5
			- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase Pengurus/Pengawas yang Mengikuti Pelatihan	10
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang Di Bina	120
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Koperasi yang Memperoleh Fasilitas Pemerintah	15	
		- Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sarana Prasarana, Permodalan, Promosi, Kemitraan Antar Koperasi, UKM, Lembaga Sejenis	15	
		Persentase meningkatnya skala usaha mikro menjadi usaha kecil	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UMKM yang tertib Administrasi dan Terlegalisasi	25
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro	17,14	
		- Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Tumbuhnya usaha baru	20	
		- Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Pendaftaran HAKI bagi UMKM	4	
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Penggunaan Teknologi untuk promosi	25	
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Meningkatnya Akses Pasar dan Permodalan bagi UMKM	40	
		- Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah UMKM yang mengikuti promosi	80	

Meningkatnya kualitas perdagangan	Persentase peningkatan omzet penjualan	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Fasilitasi Perizinan di Bidang Perdagangan	100
		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Kabupaten Klungkung	100
		- Pemeriksaan Penyimpanan Bahan berbahaya	Jumlah tempat penyimpanan Bahan Berbahaya yang diperiksa	3
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase tersedianya sarana distribusi perdagangan	100
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	100
		- Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	100
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Persentase Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Kabupaten Klungkung	100
		- Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase capaian target PAD Pasar yang dikelola oleh Pemkab	100
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase kenaikan harga sembako	10
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten Klungkung	10
		- Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang di Kabupaten Klungkung	52
		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan pelaku Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Kabupaten Klungkung	80
		- Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah pelaku usaha pupuk dan pestisida yang diperiksa terkait Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	25
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Produk Pelaku Usaha Ekspor Yang terjual	100
		Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada Kabupaten Klungkung	100
		- Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan pembinaan dan pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada Kabupaten Klungkung	2
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTP yang ditera / tera ulang	40
		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase UTP yang ditera / tera ulang dan Pengawasan	40
- Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Persentase UTP yang ditera / tera ulang dan pengawasan	40		

3.3. Program dan Kegiatan

Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2021 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung.

Dengan terjadinya pandemi Covid-19 yang berakibat pada pembatasan kegiatan dan terserapnya anggaran cukup besar dalam penanganannya maka pagu untuk Rancangan Akhir Renja 2021 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan pada Tahun 2021 melaksanakan 2 Bidang Urusan dengan Total Pendanaan APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 16.691 921 003,00 dengan 13 Program dan 18 Kegiatan dan 22 sub kegiatan.

Bidang Urusan Koperasi dan UKM dilaksanakan dalam 8 Program, 11 Kegiatan, 15 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.345 653 054,00 sedangkan Urusan Pilihan Bidang Perdagangan pada Tahun 2021 dilaksanakan dalam 5 Program, 7 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.346.267 949,00, menyesuaikan dengan pagu yang di tetapkan oleh Baperlitbang sebagai hasil rapat TAPD.

Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung melaksanakan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Detail program dan kegiatan yang direncanakan di tahun 2021 baik dari sisi penganggaran program, kegiatan maupun indikator program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3 4
Rencana Kerja Program dan Kegiatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021		Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	4	5	6	7
JUMLAH TOTAL URUSAN PEMERINTAHAN			16.691.921.003,00		51.787.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			7.345.653.054,00		8.130.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	19.30 poin	7.171.050.794,00	19.30 poin	6.630.000.000
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditindaklanjuti	100%	15.030.000	100%	50.000.000
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan penganggaran tersedia tepat waktu	8,00 dokumen	5.150.000	8,00 dokumen	30.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan kinerja terkirim tepat waktu	31,00 laporan	9.880.000	31,00 laporan	20.000.000
Administrasi Keuangan	Tersusunnya laporan penatausahaan keuangan perangkat daerah tepat waktu	3 laporan	6.621.085.802	3 laporan	6.010.000.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan tunjangan bagi ASN	100,00 persen	6.613.937.802,00	100,00 persen	6.000.000.000
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Tersusunnya laporan keuangan bulanan dan semesteran tepat waktu	14 laporan	7.148.000	14 laporan	10.000.000
Administrasi Umum	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi	100 persen	534.409.992	100 persen	555.000.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klarifikasi	100 persen	525.000	100 persen	5.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	97,00 persen	533.884.992	97,00 persen	550.000.000
Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	98 persen	525.000	98 persen	15.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Cakupan pemenuhan layanan administrasi kepegawaian tepat	100 persen	525.000	100 persen	15.000.000
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	PRESENTASE TERBENTUKNYA BADAN USAHA KOPERASI DI KABUPATEN KLUNGKUNG	100,00 persen	1.080.000	100,00 persen	75.000.000
Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah	Presentase terbentuknya Kantor Cabang, cabang pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Klungkung	100,00 persen	1.080.000	100,00 persen	75.000.000
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase terlaksananya Penyuluhan, Sosialisasi dan Verifikasi permohonan Ijin Koperasi	100,00 persen	1.080.000	100,00 persen	75.000.000
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	LAPORAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	1 Dokumen	103.882.260	1 Dokumen	150.000.000
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah	Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi dalam Daerah	50 Koperasi	103.882.260	50 Koperasi	150.000.000
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeriksaan kepatuhan Koperasi terhadap Perundang-Undangan	50 Koperasi	103.882.260	50 Koperasi	150.000.000

PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	JUMLAH KOPERASI YANG MENINGKAT KUALIFIKASINYA	3 Koperasi	1.080.000	3 Koperasi	100.000.000
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Kesehatan Koperasi	3 Koperasi	1.080.000	3 Koperasi	100.000.000
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Koperasi	1.080.000	50 Koperasi	100.000.000
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Presentase Koperasi yang Mampu Menilai Kesehatan Sendiri	12 persen	15.590.000	12 persen	600.000.000
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah	Pengurus, Pengawas dan Pengelola Bersertifikasi	2,5 persen	15.590.000	2,5 persen	600.000.000
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM	Jumlah Pengurus/Pengawas yang Mengikuti Pelatihan Perkoperasian	10 persen	15.590.000	10 persen	600.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang Dibina	120 Koperasi	990.000	120 Koperasi	150.000.000
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Koperasi yang Memperoleh Fasilitas Pemerintah	15 Koperasi	990.000	15 Koperasi	150.000.000
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sarana Prasarana, Permodalan, Promosi, Kemitraaan Antar Koperasi, UKM, Lembaga Sejenis	15 Koperasi	990.000	15 Koperasi	150.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN	Jumlah UMKM yang tertib Administrasi dan Terlegalisasi	25 UMKM	50.990.000	25 UMKM	200.000.000
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro	17,14%	50.990.000	17,14%	200.000.000
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah tumbuhnya usaha baru	20 UMKM	50.000.000	20 UMKM	150.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Pendaftaran HAKI bagi UMKM	4 UMKM	990.000	4 UMKM	50.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase penggunaan teknologi untuk promosi	25 persen	990.000	25 persen	225.000.000
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha	Meningkatnya Akses Pasar dan Permodalan bagi UMKM	40 UMKM	990.000	40 UMKM	225.000.000
Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan	Jumlah UMKM yang mengikuti promosi	80 UMKM	990.000	80 UMKM	225.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			9.346.267.949,00		43.657.000.000
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Fasilitasi Perizinan di bidang Perdagangan	100 persen	990.000	100 persen	42.000.000
Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di	Persentase Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di	100 persen	990.000	100 persen	42.000.000
Pemeriksaan Penyimpanan Bahan berbahaya	Jumlah tempat penyimpanan Bahan Berbahaya yang diperiksa	3 Tempat	990.000	3 Tempat	42.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase tersedianya sarana distribusi perdagangan	100 persen	9.305.582.949		42.800.000.000
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	persentase pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	100 persen	3.981.110.000	100 persen	35.600.000.000

Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	100 persen	3.981.110.000	100 persen	35.600.000.000
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Persentase pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Kabupaten Klungkung	100 persen	5.324.472.949	100 persen	7.200.000.000
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase tercapainya target di Pasar Umum yang dikelola oleh Pemkab	100 persen	5.324.472.949	100 persen	7.200.000.000
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase kenaikan harga sembako	10 persen	18.145.000		80.000.000
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten Klungkung	100 persen	17.590.000		80.000.000
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang di Kabupaten Klungkung	52 laporan	17.590.000	52 laporan	80.000.000
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan pelaku Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Kabupaten Klungkung	80 persen	555.000	80 persen	-
Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah pelaku usaha pupuk dan pestisida yang diperiksa terkait Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	25 orang	555.000	25 orang	-
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase produk pelaku usaha ekspor yang terjual	100 persen	525.000	100%	400.000.000
Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1	Persentase kegiatan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada Kabupaten	100 persen	525.000		400.000.000
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten Klungkung	2 kali	525.000	2 kali	400.000.000
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTP yang ditera / tera ulang	40 persen	21.025.000	40%	335.000.000
Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase UTP yang ditera / tera ulang dan pengawasan	40 persen	21.025.000		335.000.000
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Persentase UTP yang ditera / tera ulang	40 persen	21.025.000	40%	335.000.000

BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, Renstra dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan yang didalamnya memuat target kinerja yang hendak dicapai ditahun rencana dan menyesuaikan Pemendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2021 Dalam Rencana Kerja Tahunan tersebut diuraikan target Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan di tahun 2021 serta besar dana yang dibutuhkan dalam mencapai target tersebut.

Di tahun 2021 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan merencanakan beberapa target yang masih disesuaikan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 2018-2023 dan Program Prioritas Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Semakin berdayanya sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting pencapaian di tahun rencana. Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2021 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021

Pencapaian rencana target kinerja tentu membutuhkan dana yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan di tahun 2021 Di tengah situasi terkait pandemi Virus Covid-19, kebutuhan pendanaan tersebut disesuaikan dengan keadaan keuangan daerah, menyesuaikan dengan pagu yang ditetapkan Baperlitbang sebagai hasil rapat TAPD yang dipergunakan untuk mengelola sebanyak 13 Program dan 18 Kegiatan dan 22 sub kegiatan dengan usulan total anggaran sebesar Rp. 16.691 921 003,00.

BUPATI KLUNGKUNG,



I NYOMAN SUWIRTA